



PEMANDANGAN POHON NATAL DI MILAN - ITALIA

Orang-orang mengagumi pemandangan pohon Natal yang bercahaya di Duomo Square di Milan, Italia, Senin (6/12).

Penjualan Senjata di Dunia Melonjak Saat Pandemi Covid-19

Perusahaan AS terus mendominasi industri pertahanan.

STOCKHOLM(IM) - Pandemi Covid-19 telah membawa kemunduran ekonomi besar-besaran di seluruh dunia. Namun, ada satu sektor bisnis yang terbukti kebal terhadap virus korona yaitu bisnis senjata. Menurut laporan terbaru, penjualan senjata dunia justru meningkat. Data mengungkap 100 perusahaan teratas industri pertahanan menghasilkan USD531 miliar pada 2020 atau 1,3% lebih banyak dari tahun sebelumnya.

“Penjualan senjata terus meningkat selama enam tahun berturut-turut, dan rintangan ekonomi yang disebabkan Covid-19 tidak dapat membalikkan tren ini,” ungkap laporan

Institut Riset Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) pada Selasa (7/12).

“Raksasa industri sebagian besar terlindung permintaan pemerintah yang berkelanjutan untuk barang dan jasa militer, dengan beberapa negara bahkan mempercepat pembayaran untuk mengurangi dampak pandemi,” papar Alexandra Marksteiner dari Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI.

AS mempertahankan keunggulannya di sektor ini pada 2020. Ada 41 perusahaan Amerika Serikat dalam daftar, dengan lima di antaranya menempati lima tempat teratas sejak 2018. Total pendapatan

produsen senjata AS tahun lalu mencapai USD285 miliar, tumbuh 1,3% dibandingkan hingga 2019.

Perusahaan China menempati posisi kedua, dengan total pendapatan USD66,8 miliar, atau naik 13% dari penjualan senjata global pada 2020.

SIPRI menjelaskan, “Keberhasilan ini terkait program modernisasi militer Beijing yang mampu mengubah perusahaan pertahanan lokal menjadi beberapa produsen teknologi militer paling maju di dunia.”

26 produsen senjata Eropa menunjukkan “hasil yang beragam” tahun lalu, menurut lembaga Swedia itu.

Inggris berada di urutan ketiga secara keseluruhan setelah China, dengan tujuh perusahaannya di 100 Teratas menghasilkan USD37,5 miliar, yang merupakan peningkatan 6,2% dari 2019.

Perusahaan Jerman melihat

keuntungan mereka tumbuh sebesar 1,3% dan mencapai USD8,9 miliar, sementara penjualan rekan-rekan mereka di Prancis turun 7,7%.

Tren penurunan yang dimulai pada 2018 berlanjut untuk produsen senjata Rusia tahun lalu, klaim laporan itu.

Sembilan perusahaan Rusia dalam Top 100 mengalami penurunan penjualan dari USD28,2 miliar pada 2019 menjadi USD26,4 miliar.

“Kemunduran tersebut dapat dijelaskan dengan berakhirnya Program Pensejajaran Negara 2011–2020 dan diversifikasi industri pertahanan Rusia, karena perusahaan-perusahaan ditugaskan meningkatkan pangsa penjualan sipil mereka menjadi 50% pada 2030,” ungkap para penulis laporan.

Mereka tidak menyebutkan sanksi dan tekanan oleh Wash-

ington pada negara-negara yang ingin membeli senjata buatan Rusia di antara alasan yang mungkin mempengaruhi.

“Laporan oleh SIPRI tidak dapat dianggap sebagai sumber informasi yang objektif,” ungkap konglomerat industri militer Rusia Rostec dalam menanggapi angka-angka baru tersebut.

“Para analis Barat hanya mengandalkan open source dan tidak menyadari gambaran sebenarnya,” papar pernyataan itu.

SIPRI juga mengabaikan fakta bahwa sebagian besar pembayaran untuk senjata Rusia dilakukan dalam rubel, bukan dolar. Selain itu, laporan SIPRI hanya berfokus pada keuntungan, bukannya menghitung jumlah unit yang sebenarnya terjual. “Pendapatan Rostec terus tumbuh setiap tahun dan tingkat produksi tetap tinggi,” ungkap pernyataan Rostec. ● tom

Rohingya Gugat Facebook Rp2,8 Kuadriliun Terkait Kekerasan di Myanmar

LONDON(IM) - Facebook dituding melakukan pelanggaran dan memfasilitasi terjadinya genosida etnis Muslim Rohingya di Myanmar, setelah algoritma jaringan media sosial itu memperkuat ujaran kebencian dan platform tersebut gagal menghapus postingan yang menghasut. Facebook menghadapi tindakan hukum yang diluncurkan di Inggris dan Amerika Serikat (AS), serta klaim kompensasi senilai lebih dari 150 miliar Poundsterling (Rp2,8 kuadriliun).

Seperti dilaporkan The Guardian, Selasa (7/12), sebuah gugatan class action yang diajukan ke pengadilan distrik utara di San Francisco, AS, menyatakan Facebook “bersedia menaruh nyawa orang-orang Rohingya untuk penetrasi pasar yang lebih baik di negara kecil di Asia Tenggara.”

Gugatan itu menambahkan, pada akhirnya hanya ada sedikit keuntungan yang diperoleh Facebook dari kehadirannya yang berkelanjutan di Burma (Myanmar), dan konsekuensinya bagi orang-orang Rohingya tidak mungkin lebih mengerikan. Namun, di hadapan pengetahuan ini, dan memiliki alat untuk menghentikannya, ia terus bergerak maju.”

Sebuah surat yang dikirimkan oleh pengacara ke kantor Facebook Inggris pada hari Senin mengatakan, klien dan anggota keluarga mereka telah menjadi sasaran tindakan “kekerasan serius, pembunuhan dan/atau pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya” sebagai bagian dari kampanye genosida yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa dan ekstremis sipil di Myanmar.

Surat itu juga menambahkan, bahwa platform media sosial, yang diluncurkan di Myanmar pada 2011 dan dengan cepat tersebar di mana-mana, membantu proses tersebut. Pengacara di Inggris berharap untuk mengajukan klaim di pengadilan tinggi, mewakili Rohingya di Inggris dan pengungsi di kamp-kamp di Bangladesh.

“Seperti yang telah diakui dan dilaporkan secara luas, kampanye ini dipicu oleh materi ekstensif yang dipublikasikan dan diperkuat oleh platform Facebook,” kata surat dari firma hukum McCue Jury & Partners. Facebook mengakui pada 2018, bahwa itu tidak cukup

untuk mencegah hasutan kekerasan dan ujaran kebencian terhadap Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar. Sebuah laporan independen yang ditugaskan oleh perusahaan menemukannya bahwa “Facebook telah menjadi sarana bagi mereka yang ingin menyebarkan kebencian dan menyebabkan kerusakan, dan posting telah dikaitkan dengan kekerasan offline.”

“Meskipun Facebook mengakui kesalahannya dan pernyataannya tentang perannya di dunia, tidak ada satu pun kompensasi, atau bentuk reparasi atau dukungan lainnya, yang ditawarkan kepada siapa pun yang selamat,” lanjut isi surat dari firma hukum McCue Jury & Partners.

Di AS dan Inggris, tuduhan terhadap Facebook meliputi: algoritma Facebook memperkuat ujaran kebencian terhadap orang-orang Rohingya; gagal berinvestasi di moderator lokal dan pemeriksa fakta; gagal untuk menghapus pos-pos tertentu yang menghasut kekerasan terhadap orang-orang Rohingya; dan tidak menutup akun tertentu atau menghapus grup dan halaman yang mendorong kekerasan etnis.

Di AS dan Inggris, tuduhan terhadap Facebook meliputi: algoritma Facebook memperkuat ujaran kebencian terhadap orang-orang Rohingya; gagal berinvestasi di moderator lokal dan pemeriksa fakta; gagal untuk menghapus pos-pos tertentu yang menghasut kekerasan terhadap orang-orang Rohingya; dan tidak menutup akun tertentu atau menghapus grup dan halaman yang mendorong kekerasan etnis.

Jumlah etnis Rohingya yang terbunuh pada tahun 2017, selama “operasi pembersihan” militer Myanmar, kemungkinan lebih dari 10.000, menurut badan amal medis Médecins sans Frontières. Sekitar 1 juta orang Rohingya tinggal di kamp pengungsi Cox’s Bazar, di tenggara Bangladesh, di mana McCue dan Miscon de Reya, yang juga menangani kasus yang berbasis di Inggris, berharap untuk merekrut lebih banyak penuntut.

Kasus Inggris memiliki sekitar 20 pengugat sejauh ini, sementara di AS gugatan class action berharap untuk bertindak atas nama sekitar 10.000 Rohingya di negara tersebut. ● gul

Pengadilan Malaysia Tolak Banding Istri Najib Razak

KUALALUMPUR(IM) - Pengadilan Malaysia menolak banding istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor, Senin (6/12) waktu setempat. Hal ini terkait kasus korupsi proyek energi surya hibrida untuk sekolah di pedesaanNegara Bagian Sarawak senilai RM1,25 miliar (Rp4,2 triliun).

Seperti dilansir laman the Star, Selasa (7/12), putusan tersebut disampaikan oleh tiga anggota majelis yang dipimpin oleh hakim Pengadilan Tinggi Hanifah Farikullah. Hakim Hanifah mengatakan, majelis, dalam keputusan bulat, setuju dengan tuntutan jaksa bahwa pengadilan pidana tidak memiliki yurisdiksi untuk memberikan keringanan deklaratif yang diminta oleh Rosmah sebagai pemohon banding.

“Kami berpandangan bahwa keringanan itu harus masuk dalam hal-hal yang diperbolehkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (BPK),” ujarnya.

Namun, tidak ada dalam CPC yang memberikan kekuasaan dan yurisdiksi kepada Pengadilan Tinggi untuk melak-

sanakan prosedur pidananya untuk memberikan perintah deklaratif. Berdasarkan alasan-alasan itu, hakim mengungkap bahwa Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan acara pidana tidak memiliki yurisdiksi dan kekuasaan untuk memberikan keringanan yang diminta oleh pemohon banding.

“Oleh karena itu, kami mengizinkan keberatan awal jaksa dan banding pemohon ditolak,” ujarnya menambahkan.

Dia melanjutkan bahwa majelis tidak dapat melanjutkan untuk mendengarkan manfaat banding. Anggota majelis lainnya adalah hakim M. Gunalan dan Hashim Hamzah.

Panel membuat keputusan setelah mendengarkan pengajuan oleh Jaksa Utama dalam kasus Rosmah, Sri Ram dan pengacara Rosmah, Jagjit Singh dan Akberdin Abdul Kader, yang muncul untuk Rosmah.

Sebelum sidang dimulai, Jagjit meminta maaf kepada pengadilan atas nama Rosmah karena tidak hadir dalam persidangan Kamis lalu.

“(Kami) menyampaikan permintaan maaf yang mendalam kepada My Lady and

My Lords atas ketidakhadiran pemohon minggu lalu. Dia menyampaikan permintaan maaf yang tulus,” kata pengacara itu.

Rosmah, istri mantan perdana menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi pada 24 September.

Rosmah menghadapi tuduhan meminta RM187,5 juta dan dua tuduhan menerima suap senilai RM6,5 juta dari direktur pelaksana Jepak Holdings Sdn Bhd Saidi Abang Samsudin, melalui mantan asistennya Datuk Rizal Mansor, sebagai hadiah karena membantu Jepak Holdings mengamankan proyek untuk melengkapi 369 sekolah di pedesaan Sarawak dengan tenaga surya hibrida.

Pada 4 Oktober, Pengadilan Tinggi menolak permohonan Rosmah untuk menunda persidangan korupsinya sambil menunggu keputusan banding.

Menyusul putusan tersebut, Rosmah (69 tahun tahun) bersaksi sebagai saksi pembela dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi pada 5 Oktober. Sidang dijadwalkan dilanjutkan pada Rabu (8/12). ● ans



KRISIS MIGRAN DI POLANDIA

Petugas penjaga perbatasan Polandia patroli di pos pemeriksaan Kuznica-Bruzgi pada perbatasan Polandia-Belarus di tengah krisis imigran di Kuznica, Polandia, Senin (6/12).

Tiga Misionaris yang Diculik di Haiti Telah Dibebaskan

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan tiga orang misionaris yang diculik di Haiti bulan Oktober lalu telah dibebaskan. Kelompok misionaris yang melakukan perjalanan ke negara Karibia itu bermaksud di Ohio, AS.

“Kami bersyukur pada Tuhan tiga orang sandera sudah dibebaskan semalam. Mereka yang sudah dibebaskan dalam keadaan aman dan tampaknya dalam semangat yang baik,” kata Christian Aid Ministries dalam pernyataan mereka, Selasa (7/12).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengonfirmasi bebasnya tiga orang sandera itu. Ia menambatkan AS akan terus berupaya mengamankan pembebasan sandera lainnya.

Juru bicara Kepolisian Haiti Garry Desrosiers mengatakan tiga orang sandera dibebaskan Senin (6/12) malam. Ia menolak memberikan detail lebih lanjut untuk alasan keamanan para sandera lainnya.

Enam belas warga Amerika dan satu orang Kanada termasuk lima orang anak-anak diculik saat mengunjungi sebuah panti asuhan di Haiti. Peristiwa ini memperlihatkan masalah penculikan di negara itu yang berkembang menjadi isu yang sangat memprihatinkan.

Di tengah gejolak politik dan krisis ekonomi penculikan meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir, dua orang anggota misionaris sudah dibebaskan bulan lalu. Oktober lalu dilaporkan geng Haiti yang menculik anggota misionaris itu meminta uang tebusan sebesar 17 juta dolar. Surat kabar AS the Wall Street Journal melaporkan Menteri Kehakiman Liszt Qutiel, FBI, dan kepolisian Haiti sudah mengontak penculik.

Surat kabar itu melaporkan pemerintah Haiti dan AS berusaha membebaskan para misionaris yang diculik geng yang dikenal 400 Mawozo. Saat itu Qutiel mengatakan negosiasi dapat memakan waktu berminggu-minggu. ● gul

PBB Minta Militer Myanmar Setop Gunakan Kekuatan Berlebihan

NEW YORK(IM) - Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta militer Myanmar atau siapapun untuk bertanggung jawab, karena menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil yang tak bersenjata. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah pasukan keamanan menabrakkan mobil ke kerumunan pengunjuk rasa antikudeta yang menewaskan lima orang.

“Mereka yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap warga sipil tak bersenjata harus dimintai pertanggungjawaban,” kata koordinator residen PBB di Myanmar, Ramanathan Balakrishnan.

Berdasarkan sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial, sebuah kendaraan yang melaju kencang menabrak sekelompok pengunjuk rasa antikudeta pada Minggu (5/12) di Yangon. Saksi mata mengatakan kepada Reuters, puluhan orang terluka akibat insiden tersebut.

Portal berita Myanmar Now mengatakan, insiden penabrakan terjadi beberapa menit setelah aksi flash mob yang memprotes kudeta militer 1 Februari telah dimulai. Selain korban tewas, pasukan keamanan menangkup belasan peserta aksi protes.

Surat kabar Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah mengatakan, pasukan keamanan membubarkan kerusuhan yang dinilai melanggar hukum, dan menangkup delapan pengunjuk rasa. Mereka yang ditangkap akan menghadapi tinda-

kan hukum. Salah satu pengunjuk rasa pada Ahad mengatakan, dia jatuh setelah ditabrak kendaraan sebelum melarikan diri. “Seorang tentara memukul saya dengan senapannya tetapi saya membela dan mendorongnya kembali. Kemudian dia langsung menembak saat saya melarikan diri dengan pola zig-zag,” kata pengunjuk rasa, yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Dua orang saksi mengatakan, mobil yang dikendarai oleh tentara menabrak massa dari arah belakang. Tentara mengejar pengunjuk rasa yang berhamburan dan menangkupnya. Bahkan, para tentara juga melakukan pemukulan. Beberapa terluka dengan luka di kepala dan tidak sadarkan diri.

Protes anti-militer terus berlanjut sejak kudeta pada 1 Februari. Aksi protes yang tersebar seringkali merupakan kelompok kecil yang menyuarakan penentangan terhadap penggulingan pemerintahan terpilih, yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi dan kembalinya kekuasaan militer.

Sejauh ini, sekitar 1300 orang telah terbunuh sejak aksi protes. Militer mengatakan bahwa, pengunjuk rasa yang terbunuh melakukan penghasutan dan kekerasan. Sejak kudeta, perang dengan pemberontak etnis minoritas di daerah perbatasan terpencil di utara dan timur telah meningkat secara signifikan. Menurut PBB, konflik di perbatasan telah membuat puluhan ribu warga sipil mengungsi dan melarikan diri. ● ans



SEKOLAH DI FILIPINA KEMBALI DIBUKA

Siswa yang duduk di kursi dengan penghalang plastik menghadiri kelas ketika beberapa sekolah di ibu kota Filipina dibuka kembali untuk pertama kalinya sejak pandemi penyakit virus corona (COVID-19), di Pasay City, Metro Manila, Filipina, Senin (6/12).

Warga Italia yang Belum Divaksin Dilarang Akses Ruang Publik

MILAN(IM) - Pemerintah melarang warga Italia yang belum divaksinasi mengakses ruang publik untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 di tengah beredarnya varian omicron. Mereka yang belum menerima vaksinasi tidak boleh masuk ke restoran dalam ruangan (indoor), bioskop, dan museum.

Aturan tersebut mulai berlaku pada Senin (6/12) hingga 15 Januari. Selama rentang waktu tersebut polisi Italia akan memeriksa kartu hijau di tempat-tempat publik. Kartu ini menyatakan bahwa mereka telah divaksinasi atau baru saja pulih dari virus.

Selain itu, orang-orang juga harus memiliki kartu hijau atau kartu kesehatan untuk mengakses transportasi umum lokal dan menginap di hotel. Di Milan, petugas akan memeriksa kartu kesehatan sebelum penumpang diizinkan naik kereta bawah tanah atau bus.

“Oleh karena itu, Anda dapat menjaga penyebaran virus dengan langkah-langkah yang berkelanjutan, dan dengan penggunaan kartu kesehatan yang tepat. Kemudian taruhannya adalah pada vaksinasi,” ujar Direktur Pencegahan Kementerian Kesehatan Italia,

Gianni Rezza. Jumlah infeksi baru Covid-19 di Italia telah meningkat secara bertahap selama enam pekan terakhir, sebelum kekhawatiran muncul tentang varian omicron. Tingkat vaksinasi Italia lebih tinggi daripada negara tetangganya.

Sebanyak 85 persen populasi yang memenuhi syarat atau berusia 12 tahun ke atas telah divaksinasi. Tetapi orang-orang berusia 30-an, 40-an dan 50-an terbukti paling enggan untuk divaksinasi. Hampir 3,5 juta orang belum menerima vaksin dosis pertama mereka.

Kepala Institut Kesehatan Nasional Italia, Silvio Brusaferro, mengatakan, mereka adalah kelompok usia yang sama, yang sekarang paling parah terinfeksi virus korona tipe baru (SARS-CoV-2), virus penyebab Covid-19.

Pejabat kesehatan masyarakat mengatakan, kampanye vaksinasi harus dibarengi dengan perilaku publik dalam menjaga protokol kesehatan. Hal ini adalah kunci untuk mengurangi tingkat infeksi, karena pada musim dingin biasanya orang-orang lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan. ● gul